

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

Nama : Citra Dewi Hariani
Jurusang/Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Hesti Armiwulan S.H., M.Hum.
2. Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

ABSTRAK

Abstrak – Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa apakah penyelesaian sengketa pembiayaan syariah melalui pengadilan negeri yang dalam akadnya telah diperjanjikan klausul arbitrase dapat dibenarkan menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) tersebut pada tahun 2012 diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materiil tersebut menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang hanya menganulir Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 sehingga apabila para pihak dalam akad telah memperjanjikan suatu penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa yang harus dipergunakan dikemudian hari ketika timbul sengketa adalah penyelesaian sengketa yang tercantum dalam akad.

Kata kunci : bank syariah, penyelesaian sengketa, putusan mahkamah konstitusi nomor 93/PUU-X/2012, basyarnas, pengadilan negeri, pengadilan agama.

DISPUTE SETTLEMENT OF FINANCING IN ISLAMIC BANK POST CONSTITUTIONAL COURT JUDGEMENT NUMBER 93/PUU-X/2012

Name : Citra Dewi Hariani
Discipline/Study Programme : Law
Constributor : 1. Dr. Hj. Hesti Armiwulan S.H., M.Hum.
2. Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

ABSTRACT

Abstract – This writing aims to analyze if the dispute settlement of islamic financing disputes through a district court which has been agreed upon in the contract of arbitration clause can be justified according to UU No. 21 Tahun 2008 post of court judgement of the Constitutional Court Number 93/PUU-X/2012. According to the provisions of Article 55 section (2) Act Number 21 of 2008, if the parties have agreed to settle the dispute other than as referred in section (1), dispute settlement is carried out in accordance to the contents of the Agreement. The provisions of Article 55 section (2) in 2012 had been requested for judicial review to the Constitutional Court. The application of the material test resulted in the court judgement of the Constitutional Court Number 93/PUU-X/2012 which only annulled the Explanation of Article 55 paragraph (2) of Act Number 21 of 2008 so if the parties has been agreed a dispute settlement in the contract, then the dispute settlement that must be used in the future when the dispute arises is accordance to dispute settlement that stated in the contract.

Keywords : islamic banking, dispute settlement, district court, religious court.